



Journal of Government and Politics (JGOP) ISSN:2686-3391
Vol. 2 No. 2 Desember 2020

Journal of Government and Politics (JGOP)

<http://journal.ummat.ac.id/index.php/jsip>



Peran Humas Dprd Dalam Menjaga Kinerja Dan Citra DPRD (Studi pada DPRD Kabupaten Bima)

¹Haeril, ²Mas'ud, ³Taufik Irfadat

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Mbojo Bima

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: **06-10-2020**

Disetujui: **17-12-2020**

Dipublikasikan : **22-12-2020**

Kata Kunci :

Fungsi; Humas; Citra
Kinerja DPRD

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Hubungan Masyarakat (Humas) DPRD dalam menjaga kinerja dan citra DPRD Kabupaten Bima. Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa dalam menjalankan perannya Humas membangun hubungan fungsional dengan Publik secara kelembagaan dengan menjalin kemitraan dengan media massa, cetak, maupun online dengan melalui kerjasama *advetorial* dan Parlementaria dalam rangka pemuatan berita-berita kegiatan DPRD. Humas juga berupaya meng-*counter issue* (berita hoax) yang beredar di masyarakat atau di media massa dengan cepat, kemudian menerbitkan informasi dan dokumentasi kegiatan DPRD Kabupaten Bima serta mengupayakan pelayanan melalui media center dengan memberdayakan Akun media sosial milik DPRD. Humas juga berperan membentuk hubungan Sub-sistem dengan Publik, melalui tiga pendekatan yaitu sebagai penasehat ahli (*Expert prescriber*), sebagai fasilitator proses pemecahan masalah (*Problem Solving Procces Facilitator*), dan teknisi komunikasi.

***The Role Of DPRD Public Relations In Maintaining The Performance And Image Of
DPRD
(Study at DPRD Bima Regency)***

Abstract

The purpose of this study was to determine the role of Public Relations (PR) DPRD in maintaining the performance and image of the DPRD Bima Regency. This type of research uses a descriptive method with a qualitative approach. The results of the research show that in carrying out its role, Public Relations builds functional relationships with the public institutionally by establishing partnerships with mass, print, and online media through advetorial and parliamentary cooperation in the context of posting news on DPRD activities. Public Relations also tries to counter issues (hoax news) circulating in the community or in the mass media quickly, then publishes information and documentation of the Bima Regency DPRD activities and seeks services through the media center by empowering the DPRD's social media accounts. Public relations also plays a role in forming Sub-system relationships with the public, through three approaches, namely as an expert advisor (Expert prescriber), as a facilitator of the problem solving process (Problem Solving Process Facilitator), and a communication technician.

2020 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik_Ummat

*Alamat Korespondensi:

¹ Haeril.terminator@gmail.com

² Amrin5172@gmail.com

³ Taufikirfadat@gmail.com

PENDAHULUAN

Setiap instansi atau organisasi pasti membutuhkan citra yang positif atau baik di kalangan publik. Citra yang baik merupakan kebutuhan sebuah instansi atau organisasi, maka inilah yang menjadi salah satu tugas yang dilakukan oleh humas melalui program-program *public relations* (Rosyid, 2018). Karena dasarnya kesuksesan yang diperoleh sebuah instansi itu tidak lepas dari humas yang mampu menjalankan perannya dengan baik. Humas merupakan sebuah fungsi manajemen yang berperan menciptakan komunikasi, membangun serta menjaga hubungan baik antara organisasi dan publik, baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi yang pada akhirnya akan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap keberhasilan sebuah organisasi itu sendiri (Oktarina, 2019).

Demikian menurut Nandini (2017), humas atau *public relations* harus menggunakan komunikasi timbal balik (*two ways communications*) dalam aktivitas kesehariannya, selain untuk mencapai tujuan organisasi, juga untuk menghindari konflik yang bisa saja terjadi, yang pada akhirnya akan menimbulkan itikad baik (*good will*), dan dukungan demi tercapainya citra positif (*good image*) bagi lembaga/organisasi.

Humas telah menjadi “*trend*” manajemen modern dengan berbagai istilahnya. Hal ini bisa dilihat dari dibentuknya bagian atau divisi humas dalam banyak organisasi profit maupun non-profit. *Trend* humas juga hadir dalam alternative profesi yang dipilih oleh para professional lain seperti di lembaga Legislatif Daerah atau DPRD yang membentuk humas sebagai alat kelengkapan Dewan (Ismayanti, 2016).

Demikian keberadaan humas pada DPRD Kabupaten Bima. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima yang beranggotakan 45 orang, sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Bima sebagai penyambung aspirasi masyarakat. Sehingga humas harus bisa menciptakan, membangun, meningkatkan dan menjaga citra organisasi dikalangan publiknya, serta berkewajiban menumbuh kembangkan hubungan yang harmonis dengan publiknya, agar tercipta citra yang baik (Sujianti, 2018).

Disinilah peran Humas DPRD harus mampu mengamati dan mempelajari tentang hasrat, keinginan-keinginan serta sebagai divisi yang mampu memberikan nasihat dan saran tentang apa yang sebaiknya dilakukan DPRD sebagai Lembaga Pemerintah dalam menampung dan menyelesaikan semua aspirasi masyarakat tanpa adanya pihak-pihak yang dirugikan serta tetap terjalinnya hubungan yang baik dan memunculkan rasa kepercayaan antara publik dengan aparat Pemerintah (Endarta, (2011).

Apalagi di tengah turbulensi kepercayaan masyarakat Kabupaten Bima terhadap Pemerintah (*unperforming government*). Sehingga peran Humas dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas sangat penting agar peran bernegara hadir menjaga kualitas kepercayaan masyarakat (Utomo, 2019).

Demikian Nandini (2017) menambahkan, dalam kegiatannya menyebarkan informasi dan komunikasi Humas memerlukan kerjasama dengan pihak lain yaitu diantaranya adalah media. Membangun hubungan yang harmonis dengan media adalah salah satu cara yang harus dilakukan pihak humas dalam usaha mencapai tujuan.

Demikian menurut Kusuma & Paselle (2017), hubungan antara legislatif dan media memang tidak mempunyai hubungan struktural yang mengharuskan adanya keterkaitan secara lembaga. Namun, kedua lembaga ini saling membutuhkan dalam hal membangun hubungan kemitraan. Terutama kemitraan di bidang informasi, komunikasi dan kontrol sosial. Bagi lembaga legislatif hubungan kemitraan dengan media pers ini menjadi penting mengingat fungsi dan peranan pers diperlukan untuk mensosialisasikan berbagai aktifitas lembaga legislatif, baik yang berkaitan dengan fungsi legislasi sebagai pembuat Peraturan Perundang-Undangan, maupun yang berhubungan dengan fungsi kontrol terhadap eksekutif serta fungsi pengawasan terkait pelaksanaan pembangunan.

Untuk itu menjadi sangat penting bagi penulis untuk meneliti Fungsi Humas dalam menjaga citra dan Kinerja DPRD Kabupaten Bima, mengingat sangat krusialnya peran humas dalam menciptakan akuntabilitas dan transparansi sekaligus citra positif di mata publik di tengah degradasi kepercayaan masyarakat Kabupaten Bima pada Pemerintah terutama pada Lembaga Legislatif.

Dalam menganalisis dan menjelaskan lebih mendalam terkait peran dan fungsi Humas DPRD Kabupaten Bima, penulis menggunakan teori sistem milik David Easton dalam mengemukakan fakta-fakta penelitian. *Pertama*, peneliti membatasi penelitian ini pada variabel hubungan fungsional yang dibangun oleh Humas DPRD Kabupaten Bima. Yang *kedua*, mendeskripsikan hubungan sebagai sub-sistem antara Humas DPRD Kabupaten Bima dengan Publik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti atau dari keterangan pihak Humas DPRD Kabupaten Bima. Selain itu juga didukung data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari dokumen,

publikasi-publikasi, atau literatur berupa buku-buku, media cetak maupun online terkait tugas kehumasan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas observasi (*observation*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi (*documentation*). Sedangkan teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif menurut Miles dan Huberman dalam Idrus (2009; 148) dimana model interaktif ini terdiri dari dari tiga hal utama, yaitu; (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menganalisis dan menjelaskan lebih mendalam terkait peran dan fungsi Humas DPRD Kabupaten Bima, penulis menggunakan teori sistem milik David Easton dalam mengemukakan fakta-fakta penelitian. *Pertama*, peneliti membatasi penelitian ini pada variabel hubungan fungsional yang dibangun oleh Humas DPRD Kabupaten Bima. Dalam hal ini ialah hubungan fungsional dengan media maupun publik pada umumnya. Yang *kedua*, mendeskripsikan hubungan sebagai sub sistem antara Humas DPRD Kabupaten Bima dengan Publik yang satu sama lainnya saling melakukan pertukaran informasi, menerima informasi, mempelajari dan menerjemahkan masukan (*input*) menjadi luaran (*output*) yaitu berupa keputusan maupun dalam pengambilan kebijakan publik.

Membangun Hubungan Fungsional Dengan Publik

Pada dasarnya menurut Easton dalam Suryadi (2006), bahwa dalam sistem terdapat hubungan fungsional yang terutama dilandasi oleh beberapa bentuk komunikasi. Komunikasi tersebut membentuk hubungan dari beberapa bagian yang berlainan membentuk satu kesatuan dalam melaksanakan hubungan fungsional untuk menjadikan bagian-bagian itu saling bergantung satu sama lain. Sehingga kerusakan dari bagian itu dapat menyebabkan kerusakan pada keseluruhan bagian-bagian dalam hubungan itu. Sehingga dalam penelitian ini komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi yang dilakukan oleh Humas DPRD dengan media maupun publik pada umumnya, dan masyarakat Kabupaten Bima khususnya.

Secara kelembagaan tugas Kehumasan di DPRD Kabupaten Bima dijalankan oleh Sub Bagian Humas dan Protokol yang berada di bawah Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bima. Berikut adalah beberapa program Tahunan yang dijalankan Humas di DPRD Kabupaten Bima, antara lain :

1. Menerbitkan buku profil Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bima.
2. Menerbitkan Buku Memori Tugas DPRD Kabupaten Bima lima tahunan.

3. Membuat Banner Profil Alat-Alat Kelengkapan DPRD.
4. Menjalin kerjasama kemitraan dengan media massa, cetak maupun online dalam rangka pemuatan berita-berita kegiatan DPRD.
5. Menjalin kerjasama dengan media cetak dalam rangka langganan koran.
6. Mengelola program JDIIH untuk penyebarluasan produk hukum DPRD;
7. Mengelola akun-akun media sosial : Facebook, Instagram, dan youtube Humas DPRD Kabupaten Bima sebagai media penyebarluasan informasi kegiatan DPRD Kabupaten Bima.

Adapun upaya yang dilakukan Humas DPRD Kabupaten Bima dalam menjalin hubungan fungsional dengan publik ialah dengan bekerjasama dengan media-media lokal dalam mentransformasikan informasi (transparansi informasi dan akuntabilitas) ke Publik, antara lain :

1. Melakukan kerjasama dalam bentuk *advetorial* pemuatan informasi kegiatan DPRD Kabupaten Bima melalui media massa.
2. Melakukan kerjasama langganan koran khususnya cetak dengan media massa.
3. Membuat WA Group Mitra Humas DPRD Kabupaten Bima, dimana anggotanya adalah para wartawan media massa yang bertugas di Bima.
4. Secara rutin mengirimkan *press release* informasi DPRD Kabupaten Bima kepada media.

Humas juga berupaya menyusun konsep dan *counter issue* (berita) yang beredar di masyarakat atau di media massa dengan cepat, kemudian penyiapan naskah kehumasan, penerbitan informasi dan dokumentasi kegiatan DPRD Kabupaten Bima serta mengupayakan pelayanan melalui media center.

Selain itu, media-media yang menjalin kerjasama /kemitraan dengan Humas DPRD Kabupaten Bima untuk kerjasama secara *Advetorial* dan secara Parlementaria. Kerjasama secara *Advetorial* dan Parlementaria atau yang lebih dikenal dengan istilah *editorial* dan *advertising* ini berkaitan dengan periklanan/informasi sebagai upaya persuasif untuk menginformasikan kerja-kerja DPRD Kabupaten Bima lewat media cetak maupun online kepada publik. Adapun kerjasama secara *Advetorial* dan kerjasama secara Parlementaria dilakukan pada sebanyak 40 media, baik cetak maupun online. Sedangkan media yang menjalin kerjasama dalam bentuk langganan koran sebanyak 28 media cetak.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Aminurlah, SE selaku Wakil ketua DPRD Kabupaten Bima dimana Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bima sangat menyadari pentingnya peran media dalam menunjang pelaksanaan

tugas DPRD, khususnya dalam mensosialisasikan berbagai kegiatan dan informasi terkait pelaksanaan tugas DPRD. Menyadari hal itu, maka selama ini DPRD Kabupaten Bima selalu terbuka dengan rekan-rekan media, dengan selalu merespon apapun informasi yang dibutuhkan terkait pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

DPRD Kabupaten Bima juga sangat aktif melayani wawancara oleh media. Selain itu, juga rutin menjalin komunikasi dan diskusi dengan wartawan tentang berbagai hal terkait pembangunan daerah.

Kemudian Humas DPRD Kabupaten Bima juga rutin menerima, dan mempelajari berbagai masukan, saran, dan kritik masyarakat tentang berbagai hal terkait DPRD Kabupaten Bima. Semua informasi tersebut kemudian dihimpun dan dipetakan berdasarkan pokok permasalahan untuk kemudian diteruskan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bima sesuai dengan pembedaan tugas berdasarkan alat kelengkapan DPRD. Dari informasi tersebut kemudian akan ditentukan langkah tindak lanjut oleh masing-masing alat kelengkapan DPRD untuk merespon permasalahan tersebut. Hasil dari tindak lanjut oleh alat kelengkapan DPRD tersebut selanjutnya akan menjadi bahan informasi untuk diteruskan kepada publik.

Walaupun tanpa diketahui luas oleh publik, hampir sebagian kegiatan rapat-rapat di DPRD itu adalah tindak lanjut atau respon Anggota Dewan atas aspirasi atau tuntutan masyarakat yang disampaikan lewat berita-berita di media.

Selain itu, Humas juga sebagai penghubung antar lembaga pemerintah (antara DPRD dengan Eksekutif), legislatif dengan lembaga-lembaga non pemerintah, maupun dengan media, serta masyarakat luas. Dalam pelaksanaannya Humas DPRD Kabupaten Bima juga menggunakan akun Facebook dan Instagram untuk menjalankan perannya dalam mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan informasi secara berkala yang berkaitan dengan program/kebijakan, aktivitas dan capaian yang diraih oleh lembaga hingga tanggapan lembaga atas respon, aspirasi dan opini yang berkembang di masyarakat terhadap DPRD Kabupaten Bima.

Humas DPRD Kabupaten Bima sebagai bidang publikasi, manajemen informasi dan komunikasi, sangat rutin melakukan publikasi informasi pada media sosial milik DPRD Kabupaten Bima sebagai bentuk transparansi informasi publik. Termasuk yang berkaitan dengan Jadwal harian kegiatan DPRD Kabupaten Bima yang terpublish dengan baik, mulai dari waktu kegiatan, agenda, peserta rapat dan tempatnya.

Namun informasi terkait kegiatan DPRD belum sepenuhnya maksimal dilakukan, dikarenakan kurang updatenya informasi dari beberapa akun media sosial milik DPRD

Kabupaten Bima, selain itu ebsite resmi kelembagaan yang harusnya dijadikan sebagai Media Kampanye dan Publisitas DPRD Kabupaten Bima juga belum maksimal dikelola.

Selain itu juga penerbitan berita lewat kerjasama parlementaria yang belum ada jadwal khususnya. Padahal akan sangat bermanfaat bagi publik jika parlementaria bisa terbit secara berkala dan berkelanjutan.

Membentuk Hubungan Sub-sistem dengan Publik

Menurut Easton (1984), dalam sistem telah membentuk sub-sub sistem yang satu sama lainnya saling melakukan pertukaran informasi dan saling bergantung tingkah laku yang konsisten dalam menerima dan memproses *input* untuk menjadi *output* dalam hal ini adalah kebijakan Publik.

Dalam bagian ini ada tiga hal yang harus dilakukan Humas DPRD Kabupaten Bima dalam membentuk hubungan sub-sistem yaitu dengan hadir sebagai penasehat ahli (*Expert prescriber*), sebagai fasilitator proses pemecahan masalah (*Problem Solving Procces Facilitator*), dan teknisi komunikasi.

Salah satu fungsi penting dari Humas khususnya di lembaga DPRD Kabupaten Bima ialah sebagai representasi rakyat, adalah melakukan langkah-langkah dalam rangka menciptakan, membangun, meningkatkan dan menjaga citra DPRD di hadapan publik, sehingga melahirkan kepercayaan serta dukungan publik terhadap kebijakan DPRD secara kelembagaan. Dalam konteks itu, selama ini Humas di DPRD Kabupaten Bima melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Berupaya secara maksimal menyajikan informasi tentang berbagai kegiatan dan produk yang dihasilkan oleh DPRD.
2. Memantau dan merespon opini publik yang berkembang, baik di media massa maupun di tengah-tengah masyarakat yang berkaitan dengan DPRD, kemudian Humas hadir menanggapi permasalahan dan menyajikan informasi untuk merespon balik opini yang berkembang tersebut, sehingga opini yang berkembang tidak bias dan merusak citra lembaga.
3. Humas memanfaatkan media informasi dengan cepat dan tepat dalam menyebarkan informasi kepada publik. Semua saluran media digunakan untuk menyebarkan informasi tersebut.
4. Melakukan koordinasi dan kemitraan yang harmonis dengan semua stakeholder, terutama rekan-rekan media dalam menunjang kerja kehumasan untuk kepentingan terjaganya citra baik lembaga DPRD Kabupaten Bima.

Dalam upaya untuk menampung ide-ide atau aspirasi yang ditemukan dari permasalahan-permasalahan yang muncul di masyarakat, dimana ide-ide atau aspirasi tersebut akan ditampung oleh pihak humas untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk pelaksanaan kegiatan yang akan datang. Hal ini menunjukkan bahwa Humas di DPRD Kabupaten Bima telah menjalankan perannya sebagai penasehat ahli. Salah satu peran Humas yaitu sebagai penasehat ahli (*Expert prescriber*) dimana seorang Humas harus memiliki pengalaman dan kemampuan yang tinggi untuk dapat membantu mencari solusi dalam penyelesaian masalah publik.

Fungsi *Expert prescriber* yang dilakukan oleh Humas DPRD Kabupaten Bima yaitu terkait aspirasi masyarakat yang ditindak lanjuti oleh anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bima yaitu terkait aspirasi masyarakat So Tengke Kecamatan Sanggar mengenai pelanggaran prosedur sertifikasi lahan oleh BPN Kabupaten Bima.

Kehadiran Humas DPRD Kabupaten Bima sebagai fasilitator proses pemecahan masalah (*Problem Solving Procces Facilitator*) merupakan suatu hal yang sangat penting dalam terciptanya citra yang baik dimata masyarakat. Membentuk citra yang baik ini sangat penting bagi organisasi atau instansi pemerintahan maupun non pemerintahan. Sebagai fasilitator proses pemecahan masalah, Humas DPRD Kabupaten Bima telah menjalankan perannya dengan baik. Humas DPRD Kabupaten Bima berkolaborasi dengan pimpinan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada dimasyarakat Kabupaten Bima. Terutama untuk menghindari adanya isu-isu negatif di masyarakat, keberadaan humas sangat diperlukan untuk menjadi penengah dan pemberi solusi agar masyarakat tidak membuat isu-isu negatif yang belum tentu kebenarannya.

Humas DPRD juga sebagai Fasilitator Komunikasi (*Communication Fasilitator*) yang merupakan elemen penting yang dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap Pemerintah. Humas memiliki peran sebagai fasilitator komunikasi antara pemerintah dan publiknya. Humas di DPRD Kabupaten Bima telah menjalankan perannya sebagai fasilitator komunikasi dengan merancang semua komunikasi apa saja yang dilakukan oleh DPR dan memberikan informasi secara jelas kepada publik agar tercipta pemahaman publik, khususnya pemahaman publik mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak DPRD Kabupaten Bima.

Rapat bersama yang dilakukan di Aula kantor Camat Sanggar yang dihadiri oleh Camat, Muspika, Dinas Lingkungan Hidup, BKPH, Kades Kore dan sejumlah tokoh masyarakat initelah menghasilkan kesepakatan penting yaitu:

1. Mengosongkan lahan sekitar mata iar seluas 50 Ha

2. Melakukan Reboisasi lahan yang sudah terlanjur dibabat,
3. Membentuk tim patroli gabungan untuk menjaga lokasi agar tetap steril dari aktivitas masyarakat.
4. Pemetaan sekaligus sertifikasi oleh Pemdes Kore sebagai Aset Desa;
5. Untuk peningkatan upaya pelestarian kawasan tersebut akan diupayakan sejumlah program dan kegiatan yang akan dianggarkan.

Peran humas sebagai fasilitator komunikasi dimana humas bertindak sebagai komunikator atau mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal mendengar apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publiknya. Sebagai penghubung antara pihak DPRD Kabupaten Bima dengan masyarakatnya agar proses penyampaian informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak DPRD dapat berjalan dengan lancar maka humas DPRD Kabupaten Bima melaksanakan peran humas dengan menyampaikan informasi ke publik.

Pada dasarnya peran Humas sebagai fasilitator proses pemecahan masalah berarti humas membantu Pimpinan organisasi, baik sebagai penasehat hingga berperan mengambil langkah dalam mengatasi persoalan yang dihadapi secara rasional dan professional. Peran humas sebagai fasilitator proses pemecahan masalah sudah diwujudkan oleh humas DPRD Kabupaten Bima dengan memberikan pelayanan yang baik, menampung aspirasi masyarakat, kritik dan juga saran, kemudian mencari solusi dari permasalahan yang ada.

Selain itu peran humas sebagai teknisi komunikasi memiliki perbedaan dari ketiga peran humas yang sebelumnya. Peranan teknik komunikasi berhubungan dengan bagaimana alur atau proses Peran Humas dalam memberikan citra positif pada Lembaga DPRD Kabupaten Bima.

Peran humas sebagai teknisi komunikasi menunjukkan bahwa peran humas berkaitan dengan bagaimana teknik humas dalam mengkomunikasikan informasi ke publiknya. Alur kegiatan kehumasan di DPRD Kabupaten Bima dengan mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi keinginan masyarakat, kemudian dirapatkan terlebih dahulu dengan yang bersangkutan, baru dibuatkan rencana kedepannya untuk diinformasikan kepada masyarakat jika tuntutan atau aspirasinya sudah didengar oleh pihak DPRD dan akan direalisasikan kedepannya.

Seperti halnya tuntutan massa aksi Laskar Tani Donggo Soromandi yang menuntut BUMD PD. Wawo untuk menyerap produksi pertanian masyarakat Kabupaten Bima. Untuk merespon itu Humas DPRD Kabupaten Bima merilis berita tersebut di media dan memposting di akun Facebook resmi milik DPRD Kabupaten Bima. Sehingga pada tanggal 8

juli 2020 Anggota DPRD Dapil III membuat pernyataan sikap merespon tuntutan masyarakat yang ditanda tangani diatas materai dan dibacakan dihadapan massa aksi.

Ada 4 (empat) poin isi pernyataan sikap tersebut yaitu;

1. Mendorong BUMD untuk bisa menyerap produksi pertanian masyarakat Kabupaten Bima,
2. Mendorong PD. Wawo mengembangkan orientasi usahanya tidak hanya mengelola garam, tapi juga mampu membeli dan menjual produk pertanian masyarakat seperti jagung dan bawang.
3. Mendesak Pemerintah Daerah untuk merestrukturisasi manajemen PD. Wawo dengan mendorong penyelesaian Raperda perlindungan dan Pemberdayaan petani yang saat ini sudah masuk Propemperda Kabupaten Bima tahun 2020 untuk dituntaskan paling lambat tahun 2021.
4. Mendorong Pemerintah Daerah untuk menghadirkan gudang pembelian jagung dan teknologi pertanian di Kabupaten Bima di setiap Kecamatan sentra produksi.

Pernyataan sikap tersebut dibuat sebagai tanggungjawab untuk diperjuangkan dan dilaksanakan sesuai kapasitas, fungsi dan wewenang sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bima Dapil III yaitu Kecamatan Donggo, Soromandi, dan Tambora.

Kemudian pada tanggal 21 Juli 2020, atas nama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima Bapak Muhammad Aminullah SE, menyurati PD. Wawo dengan nomor surat 172/ /DPRD/2020 terkait pemeriksaan Kinerja. Dengan tercapainya upaya-upaya pemecahan masalah publik tersebut, tentu menjadi sesuatu hal yang sangat penting dalam terciptanya citra dan kinerja kelembagaan yang baik di mata publik. Humas mengidentifikasi dan memetakan isu-isu dimasyarakat, sedangkan Pimpinan DPRD maupun komisi terkait yang turun langsung memberi solusi.

Namun saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa Humas DPRD Kabupaten Bima belum sepenuhnya mampu mengontrol isu-isu negatif tentang lembaga yang berkembang dimasyarakat. Dikarenakan adanya media abal-abal yang memberikan pemberitaan dengan narasi yang sebenarnya tidak sesuai dengan fakta dilapangan.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Membangun hubungan fungsional dengan Publik. Humas DPRD Kabupaten Bima secara kelembagaan menjalin kerjasama kemitraan dengan media massa, cetak maupun online dengan melalui kerjasama *advetorial* dan Parlementaria dalam rangka pemuatan berita-

berita kegiatan DPRD. Kemudian Humas juga berupaya mengcounter issue (berita) yang beredar di masyarakat atau di media massa dengan cepat, kemudian menerbitkan informasi dan dokumentasi kegiatan DPRD Kabupaten Bima serta mengupayakan pelayanan melalui media center dengan memberdayakan Akun Official Instagram, Facebook dan Youtube milik DPRD.

2. Dalam membentuk hubungan Sub-sistem dengan Publik, Humas DPRD Kabupaten Bima hadir dengan tiga pendekatan yaitu sebagai penasehat ahli (*Expert prescriber*), sebagai fasilitator proses pemecahan masalah (*Problem Solving Procces Facilitator*), dan teknisi komunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto Dan Prasadja, Heru. 1993. *Langkah-Langkah Penelitian Sosial*. Arcan. Jakarta.
- Adi, Rianto. 2004. *Metodelogi Sosial Dan Hukum*. Granit. Jakarta.
- Anggara, S. (2013). *Sistem Politik Indonesia* (Vol. 1, No. 1). Cv Pustaka Setia
- Agustini, E. (2015). *Keefektifan Publikasi Sekretariat Dprd Provinsi Jawa Timur Sebagai Humas Dprd Provinsi Jawa Timur* (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga).
- Black, A. James Dan J. Champion, Dean, 2009. *Metode & Masalah Penelitan Sosial. Bandung. Refika Aditama. Cetakan Keempat.*
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodelogi Penelitian Sosial "Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*. Airlangga University Press. Surabaya.
- Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2007). *Designing And Conducting Mixed Methods Research*.
- Dewi, S. Y. (2018). *Peran Humas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kota Bekasi Dalam Pengelolaan Buletin Swara Dprd* (Doctoral Dissertation, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya)
- Davis, Gordon B. 1991. *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen Bagian 1*. Jakarta: Pustaka Binamas Pressindo.
- Dawson, R. (1994). *The 13 secrets of power performance*. Prentice Hall Direct.
- Endarta, A. S. (2011). *Peran Humas Dprd Surakarta Dalam Membangun Hubungan Dengan Media Tahun 2011* (Doctoral Dissertation, Universitas Sebelas Maret).
- Easton, D. (1984). *Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik*. Jakarta: Bina Aksa.
- Faradila, E. (2018). *Aktivitas Humas DPRD Kota Medan Sebagai Fungsi Mediator dan Publisitas* (Doctoral dissertation).

- Hanum, A. M. *Pendekatan Teori Struktural Fungsional Dalam Perumusan Sistem Politik Di Indonesia*.
- Hasibuan, M. S., & Hasibuan, H. M. S. (2016). *Manajemen sumber daya manusia*. Bumi Aksara.
- Hasan, H. (2019). *Analisis Yuridis Kinerja Lembaga Legislatif (DPRD) Kabupaten Bima menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Hersey, P., & Blanchard, K. H. (1993). *Organizational behavior: Utilizing human resources*.
- Ismayanti, R. (2016). *Peranan Hubungan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai* (Doctoral Dissertation, Universitas Negeri Makassar).
- Koentjaraningrat, 1993. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Kusuma, A. R., & Paselle, E. (2017). *Peran Humas Sekretariat Dprd Dalam Menjalin Hubungan Sinergis Antara Media Dengan Dprd Kabupaten Bulungan*. *Jurnal Administrative Reform (Jar)*, 3(4), 441-451.
- Kusumaningsih, O. (2020). *Fungsi Humas Dan Protokol Dalam Komunikasi Politik Dprd Kabupaten Cilacap*. *Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi*, 17(1), 30-36.
- Lubis, E. E. (2012). *Peran Humas Dalam Membentuk Citra Pemerintah*. *Jiana (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 12(1).
- Latipulhayat, A. (2015). *Khazanah: Friedrich Karl Von Savigny*. *Padjadjaran Journal Of Law*, 2(1).
- Mariam, R. (2009). *Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja karyawan sebagai variabel intervening studi pada Kantor Pusat PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)* (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Mangkuprawira, S., & Hubeis, A. V. (2007). *Manajemen mutu sumber daya manusia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Megy, P. (2012). *“Strategi Humas Dan Protokol Dprd Provinsi Diy Dalam Menjalankan Tugas Dan Perannya” (Studi Deskriptif Mengenai Peran Humas Dan Protokol Dprd Diy Dalam Memfasilitasi Penyelenggaraan Penyampaian Aspirasi Masyarakat Kepada Pemerintah)* (Doctoral Dissertation, Upn" Veteran" Yogyakarta)..
- Muhammad Idrus. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial “Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif” Edisi Kedua*. Jakarta. Erlangga.

- Mangkunegara, A. P., & Prabu, A. (2006). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Nandini, R. F. (2017). *Efektivitas Media Relations Dalam Meningkatkan Citra Positif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi (Studi Deskriptif Analisis Efektivitas Media Relations Dalam Mempublikasikan Program Kerja Guna Meningkatkan Citra Positif Dprd Kota Jambi)* (Doctoral Dissertation, Perpustakaan).
- Oktarina, A. (2019). *Strategi Public Relations Dalam Mempertahankan Citra Positif Dprd Kabupaten Rejang Lebong* (Doctoral Dissertation, Iain Curup).
- Robert G. , Dkk. 1991. *Sistem Informasi Untuk Manajemen Modern*. Jakarta: Erlangga.
- Romi, M. (2020). *Kualifikasi Humas DPRD Kabupaten Rokan Hilir Dalam Membangun Relasi Dengan Media Relations* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim RIAU).
- Rosyid Al Habib, D. E. R. I. L., & Suratman, B. (2018). *Peran Humas Dalam Meningkatkan Citra Positif Pada Lembaga Pemerintahan Dprd Kabupaten Nganjuk*. *Jurnal Administrasi Perkantoran*, 6(2).
- Rusdiana, A., Rusdiana, A., Irfan, M., & Irfan, M. (2014). *Sistem Informasi Manajemen*.
- Rusjiana, J. (2016). *Pengaruh Sistem Informasi Sdm Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Rabbani Bandung*. *Jurnal Computech & Bisnis*, 10(1), 21-29.
- Stolovitch, H. D., & Keeps, E. J. (1992). *Handbook of human performance technology: A comprehensive guide for analyzing and solving performance problems in organizations*. Pfeiffer.
- Sujianti, I. N. (2018). *Strategi Humas Dalam Meningkatkan Citra Positif Dprd Kota Malang (Studi Pada Humas Sekretariat Dprd Kota Malang)* (Doctoral Dissertation, University Of Muhammadiyah Malang).
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&B*.
- Sule, E. T., & Saefullah, K. (2005). *Pengantar Manajemen*. Prenada Media
- Trastiova, B. (2016). *Peran Humas Dalam Memfasilitasi Kegiatan Dewan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Humas Dprd Kota Surakarta* (Doctoral Dissertation, Universitas Sebelas Maret).
- Usman, Husaini Dan Akbar, S Punomo, 2011. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Utomo, K. P. (2019). *Penerapan Fungsi Kerja Dan Nilai Organisasi Pada Tingkat Kepercayaan Masyarakat*. *Optimal: Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 13(1), 14-28.

- Senjaya, I. W. (2017). *Kebijakan Publik Perlindungan Lahan Pertanian Di Kabupaten Batang: Analisis Teori David Easton*. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 825-832.
- Saputra, R. 2013. *Rekrutmen Partai Politik (Studi Pola Rekrutmen Partai Solidaritas Indonesia Terhadap Anak Muda)* (Bachelor's Thesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Politik Dan Ilmu Sosial Uin Syarif Hidayatullah).
- Suryadi, B. (2006). *Kerangka analisis sistem politik Indonesia*. IRCiSoD.
- Whitmore, J. (1996). *Coaching for performance*. N. Brealey Pub..
- Widjaja, H.A.W., 2008, *Komunikasi: Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*, PT Bumi Aksara, Cet. 5, ed 1, Jakarta
- Zainal, N. H. (2008). *Analisis Kesesuaian Tugas Pokok Dan Fungsi Dengan Kompetensi Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah Kota Makasar*. Makassar: Fisipol.